

Jurnal ISSN 1907-316X
Logos Spectrum

Volume 9, No 3, Juli - September 2014

**Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
Dalam Mengalokasikan Anggaran Mewujudkan Aspirasi Rakyat (Revisi)
Jamin Potabuga**

**Kinerja Koperasi Unit Desa Wenang
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya
Dolina Tampi**

**Konstruksi Sosial Budaya Mapalus Dalam Kehidupan Masyarakat
(Studi Kasus Desa Tember Kecamatan Tompaso)
Selfie Wowor**

**Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Program Keluarga Dan Masyarakat Sejahtera Di Kampung Menawi
Femmy C.M. Tasik**

**Pengrajin Industri Keramik Desa Pulutan Kecamatan Remboken
Shirley Goni**

**Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun "Tunan"
Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara
Nicolaas Kandowangko**

**Peran Keluarga Terhadap Proses Penyembuhan
Penderita Gangguan Jiwa
Hendrik Willem Pongoh**

**Peran Komunikasi Lintas Budaya, Suatu Studi Interaksi Sosial antara
Masyarakat Minahasa dan Papua Di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya
Evie A.A. Suwu**

**Persepsi Masyarakat Tentang Lokasi Prostitusi Liar
Di Lorong Popaya Kota Bitung
Juliana Lumintang**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI**

Jurnal	Vol 9	No 3	Hal 172 - 307	Manado	ISSN
Logos Spetrum				Juli - September 2014	1907-316X

ISSN 1907-316X

JURNAL LOGOS SPECTRUM

Volume 8, No 4, Oktober – Desember 2013

KOMPOSISI PERSONALIA JURNAL LOGOS SPECTRUM

Pelindung

Dekan Fisip Unsrat
Philep M. Regar

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Sosiologi
Nicolaas Kandowangko

Pemimpin Umum/Redaksi

Anthony Purwanto

Redaktur Pelaksana

Hendrik W. Pongoh

Dewan Redaksi

Benedicta J. Mokalua
Hendrik W. Pongoh
I Nengah Punia
Fonny J. Waani
Eveline J.R. Kawung
Shirley Y.V.I. Goni

Mitra Bebestari

Basri Amin
(Univ. Gorontalo)
Yustinus Slamet Antono
(STFT. St.Yohanes. Pematang Siantar)

Editor Eksekutif

John Dewey Zakarias

Administrasi Keuangan

Evie A.A. Suwu

**Diterbitkan Oleh : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat
Manado, bekerja sama dengan penerbit Media Pustaka Manado**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas petunjuk dan kasihnya sehingga kita senantiasa berkarya membangun peradaban bangsa, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk penerbitan *Jurnal Ilmiah Logos Spectrum* Volume 9 Nomor 3. Juli - September 2014

Pada volume kali ini, dimuat sepuluh artikel yang berupa hasil penelitian maupun kajian ilmiah dari beberapa penulis dengan latar belakang Akademik dari wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku dan Papua.

Jurnal Logos Spectrum merupakan media informasi dalam rangka menyebarkan berbagai karya ilmiah, baik berupa hasil penelitian maupun tulisan ilmiah populer yang ditulis oleh para penulis yang mempunyai latar belakang bidang ilmu sosial yang berminat mempublikasikan karya-karyanya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga tulisan-tulisan yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Selamat Membaca

Redaksi

JURNAL LOGOS SPECTRUM

VOLUME 9, NO 3, JULI - SEPTEMBER 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -- ii

DAFTAR ISI -- i

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Mengalokasikan Anggaran Mewujudkan Aspirasi Rakyat (Revisi). -- 172

Jamin Potabuga

Kinerja Koperasi Unit Desa Wenang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya. -- 178.

Dolina Tampi

Konstruksi Sosial Budaya Mapalus Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tember Kecamatan Tompaso) -- 194

Selfie Wowor

Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga Dan Masyarakat Sejahtera Di Kampung Menawi. -- 210

Femmy C.M. Tasik

Pengrajin Industri Keramik Desa Pulutan Kecamatan Remboken. -- 227

Shirley Goni

Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun "Tunan" Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. -- 242

Nicolaas Kandowangko

Peran Keluarga Terhadap Proses Penyembuhan Penderita Gangguan Jiwa

Hendrik Willem Pongoh. -- 258

Peran Komunikasi Lintas Budaya, Suatu Studi Interaksi Sosial antara Masyarakat Minahasa dan Papua Di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya. -- 276

Evie A.A. Suwu

Persepsi Masyarakat Tentang Lokasi Prostitusi Liar Di Lorong Popaya Kota Bitung. -- 293.

Juliana Lumintang

Jurnal	Vol	No	Hal	Manado	ISSN
	9	2	78 - 171		
Logos Spetrum				April - Juni 2014	1907-316X

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Mengalokasikan Anggaran Mewujudkan Aspirasi Rakyat (Revisi)

Jamin Potabuga
Dosen Pada Program Studi Ilmu Politik Fispol Unsrat

Abstrack

Performance Member Parliament Town of Manado Local can be translated as an real action become activity yielding certain development for the sake of society or pubic, which can assessed to succeed to fail into execute function and duty which is responsibility by each Member Parliament Lokal Town of Manado. On that account performance represent interpretation an efficacy and or failure of attainment of performance. This statement become the basis for researcher to know and and study yielded performance. This statement become the basis for researcher to know, to-stadying performance each Member Parliament Lokal of Manado in budget allocation and realize society aspiration.

Method which is used in this research that is cualitative descriptive method, whith data collecting through relied on field observation and interview is bibliography study as basis for teoritik. Informan selected whith a purpose to description result of performance, amounting to 13 people (sampel) from 40 Member Parliament Local people of Manado (research population). Result of observation and interview allied with research of document result of conference and solution of Cost Estimate Revenue and expenditure of area year 2009 and also its execution of year 2010.

Result of research indicate that : (1)Member Parliament Area Town performance of Manado in budget allocation move forward very low society aspiration. Only 4 member people from 40 Member Parliament Area Town people of Manado a success fight for people aspiration get budget allocation. That is making bridge and road; street with amount of Rp. 2.062.900.000,- only 0,5% from Rp. 477.183.819.955,- expensive development of town Manado budget year 2010. 99,5% society aspiration for Mayor and overall him routine or Direct expense of Rp. 184.659.469.569,-. Expense entirely Rp. 661.843.316.564; (2) in Member Parliament Area Town performance of Manado good by self or team is obliged to accept, accommodating and permaeating society aspiration and also follow-up represent Parliament Area Town discipline of Manado wich must be executed.

This research give conclusion that Parliament Area Town performance of Manado is very low. And this research give suggestion trhat : (1) each; every Member Parliament Area Town of Manado immediately improve its interest, passing effort comprehend process, procedure, principalty's and mechanism in solution device system and stimulating of revenue plan and area exepense and also revenue plan implememntation and area expenche; (2) require to be given by sanction to Member Parliament Area Town of Manado which impinge discipline (for example salary do not be paid or changed by between time).

Key word : Realize society aspiration

PENDAHULUAN

Kemauan politik daerah-daerah untuk mendapatkan hak dan kewajiban politik, mengatur dan mengurus sendiri daerahnya telah diwujudkan oleh pemerintah pusat melalui pengesahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No 12 tahun 2008. Dengan undang-undang ini pemerintah dan daerah otonom berhak dan berkewajiban

mengelola sumberdaya pembangunan, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan akan hak dan kewajiban serta tujuan otonomi daerah, maka masyarakat daerah otonom mendapatkan kewenangan memilih sendiri Gubernur atau Bupati atau Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksana utama dan penentu keberhasilan pembangunan

daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak berlakunya undang-undang ini pemerintah daerah pada umumnya gagal membangun daerahnya masing-masing, oleh karena itu terpilihnya kepala daerah dan anggota DPRD yang lebih mementingkan kemakmuran diri sendiri, kelompok tertentu dan partai yang mengusung mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Yang berkembang pesat adalah munculnya daerah-daerah otonom Kabupaten baru, Propinsi dan Kota hanya dengan modal komitmen membangun, yang disampaikan melalui Visi Misi pada saat kampanye oleh para calon Gubernur atau Bupati atau Walikota dan para calon anggota DPRD yang diusung oleh partai-partai politik sebagai janji politik, untuk membujuk rakyat agar mereka dipilih, kemudian setelah terpilih mereka ingkar janji "janji tinggal janji". Janji politik tersebut telah menjadi isu politik nasional yang faktual saat ini dan belum ada penelitian yang membuktikan kebenaran dan kajian ilmiah menemukan jalan penyelesaian, sehingga perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk menemukan kejelasan konsepnya. Langkah awal menelusuri obyek penelitian yaitu anggota DPRD Kota Manado dan rakyat pemilih, daerah pemilihan, daerah asal masing-masing anggota DPRD yang terpilih sebagai informan, referensi dan dokumen yang mendukung.

Selanjutnya ditentukan konsep yang menjelaskan melalui mana janji-janji politik diproses, yaitu pada " Kinerja anggota DPRD Kota Manado" dan bagaimana janji-janji politik diwujudkan yaitu pada "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" mengenai bidang program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan. Jadi dalam hal ini konsep yang digunakan sebagai pengarah lapangan penelitian dan pembahasan ialah apa konsep kinerja dan konsep anggaran. Dengan demikian maka yang menjadi judul penelitian ini adalah : Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Mengalokasikan Anggaran dalam Mewujudkan Aspirasi Rakyat.

Definisi konsep Kinerja yaitu terjemahan dari *performance* yang merupakan fungsi dari kesanggupan (*ability*) dan juga motivasi (*motivation*), kesanggupan dan kemampuan digambarkan oleh kapasitas dan teknik, yang

memberikan indikasi sampai seberapa jauh *performance* tersebut, Katz et al, (1982). Sampai seberapa jauh kapabilitas tersebut dapat diciptakan semua tergantung pada tingkat mana individu atau kelompok dapat dimotivasi agar dapat menghasilkan kemampuan. Dalam organisasi, *performance* dihasilkan oleh agregat usaha-usaha individu dan kelompok untuk dapat mencapai tujuan. Menurut Robin, dalam Katz F.E. dan Weig J.E.R, (1982) *performance* atau kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau *ability* (A), motivasi atau *motivation* (M) dan kesempatan atau *opportunity* (O) , yaitu kinerja sama dengan { A x M x O } , artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan juga kesempatan. Arti kata *performance* sebagai kata benda (*noun*) ialah hasil dari suatu pekerjaan (*thing done*) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung-jawabnya masing masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Berdasarkan pada pengertian konsep kinerja tersebut kemudian dikaitkan dengan fungsi dari setiap anggota DPRD mengenai janji politik membangun prasarana ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditinjau adalah kemampuan, dan motivasi, serta kesempatan, sampai seberapa jauh kapabilitas tersebut dapat diciptakan untuk bisa menghasilkan suatu bukti nyata adalah membangun yang dinilai sebagai hasil kinerja setiap anggota DPRD. Kinerja yaitu hasil atau tingkat keberhasilan dari seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas Griffin, (2007). Tingkat keberhasilan dilihat pada setiap tahun dalam APBD, pertanyaannya adalah berapa paket program pembangunan sebagai pewujudan aspirasi rakyat yang mendapatkan alokasi anggaran yang diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD? Jawaban menjadi ukuran atau nilai daripada kinerja. Siagian (2002), mengatakan tentang kinerja aparatur sebagai satu paradigma tradisional yang berlaku dalam lingkungan birokrasi pemerintahan ialah paradigma legislatif, artinya, kinerja para aparatur pemerintahan diukur dari kemampuan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, legislatif berfungsi sebagai

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Mengalokasikan Anggaran Mewujudkan Aspirasi Rakyat (Revisi)

tukang stempel.

Paradigma baru perencanaan APBD berlaku sejak pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menuntut adanya suatu akuntabilitas publik dari setiap anggota DPRD. Posisi sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya melalui proses perencanaan pengelolaan APBD. Hasilnya tercermin pada alokasi anggaran pembangunan pada APBD yang legal disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah setiap tahun. Menurut Mardiasmo (2002), tahapan yang strategis peran, tugas dan fungsi anggota DPRD dalam proses anggaran adalah :

1. Tahap persiapan dan tahap penyusunan anggaran Daerah;
2. Tahap ratifikasi anggaran daerah;
3. Tahap pelaksanaan anggaran daerah;
4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran daerah

Keempat tahapan tersebut oleh anggota dewan daerah punya kesempatan bekerja giat dan gigih untuk lebih mengoptimalkan kemampuannya sedemikian rupa sampai program pembangunan kesejahteraan rakyat diwujudkan. Pada tahap pertama anggota dewan menggunakan masa reses menjangkau aspirasi masyarakat yang kemudian usulan pembangunan pro rakyat disinkronisasikan dengan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang telah dilaksanakan oleh Bappeda di tingkat Desa, Kecamatan dan Kota. Tahap kedua anggota dewan mengajukan program yang pro rakyat menjadi agenda pembahasan rancangan anggaran internal DPRD dengan cara menggunakan kecerdasan kompetensi politik konsep artikulasi agregasi kepentingan, lobi, fraksi dan komisi sampai berhasil. Tahap ketiga dan keempat tinggalah melanjutkan dengan koordinasi yang intensif.

Bertolak dari latar belakang masalah dan kajian konsep sebagai pengarah lapangan penelitian tersebut diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja dari anggota DPRD Kota Manado memperjuangkan aspirasi rakyat melalui proses perencanaan APBD dan kenyataan apakah telah ada bukti pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat ?

METODE PENELITIAN

Pedekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori, 2011).

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado periode 2009 - 2014. Waktu Penelitian Maret 2009 sampai dengan Oktober 2010.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, uraian serta penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dari dokumen yang tertulis, pelaku atau subyek yang diamati (Moleong, 2000)

Sumber Data penelitian

Sebagai instrument kunci adalah saya berbaur langsung dalam observasi, unsure informan anggota DPRD Kota Manado, tokoh masyarakat di daerah pemilihan asal anggota dewan, dokumen APBD tahun 2010.

Teknik mendapatkan informan

Purposive sampling, snowball sampling dan triangulasi.

Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dengan pedoman acuan bersifat terbuka dan terstruktur, studi dokumen yang menjadi bukti penelitian dengan standar kualitatif tidak reaktif

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif, teknis ini menurut Milles dan Houberman (2001) diterapkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dengan Kredibilitas. Defendabilitas, konfirmabilitas dan tranperabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian langsung dilapangan menunjukan bahwa kinerja 40 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Manado pada tahun anggaran 2010 dalam melaksanakan tugas, dan wewenang serta fungsinya untuk mewujudkan aspirasi rakyat ditinjau menurut konsep kinerja sangat kurang. pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat belum nyata buktinya. Janji politik ketika kampanye dan masa reses untuk menjaring aspirasi dari masyarakat berkerja demi kesejahteraan rakyat ternyata belum ditepati. Data membuktikan bahwa dari 40 (empat puluh) orang jumlah anggota DPRD Kota Manado terdapat 16 (enam belas) orang tidak menyerap aspirasi rakyat dan tidak ada hasil yang diwujudkan. 20 (dua puluh) orang menyerap aspirasi rakyat dan tidak berhasil mewujudkan, 4 (empat) orang menyerap aspirasi rakyat dan berhasil mewujudkan. Jumlah tersebut dilihat dan dihitung pada APBD Kota Manado tahun anggaran 2010 berjumlah Rp.639.963.961.995 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian pembelanjaan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung untuk membayar gaji pegawai dan pembiayaan operasional berjumlah Rp.184.659.496.569 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Belanja tidak langsung untuk membayar pembangunan seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, pabrik dan lain sebagainya adalah berjumlah Rp.477.183.819.995 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah). Berdasarkan data belanja tidak langsung tersebut dilihat dan dihitung berapa jumlah bangunan fisik yang dibangun dan rincian biaya tiap unit bangunan yang tercantum dalam daftar belanja pembangunan fisik. Kemudian untuk mengetahui siapa anggota DPRD yang meperjuangkan tiap unit bangunan, ditelusuri melalui wawancara dan observasi lapangan melihat bukti nyata fisik bangunan telah disesuaikan dengan daftar belanja pembangunan dalam belanja tidak langsung APBD. Hasil penelitian ini telah

menemukan kebenaran yang sesungguhnya bahwa janji politik anggota DPRD terbukti tidak ditepati. Kasus ini menunjukan peranan 40 orang anggota DPRD Kota manado ternyata hanya ada 4 (empat) orang yang berhasil mewujudkan aspirasi rakyat, yaitu Pembangunan Jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran berjumlah Rp.2.062.900.000 (dua miliar enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) 0,5 % dari belanja pembangunan. Pembangunan jalan dan jembatan itu tidak secara langsung akan berpengaruh meningkat kesejahteraan rakyat miskin karena jalan dan jembatan sudah dibangun pada waktu lampau telah menjadi sempit kemudian dibongkar dan dilebarkan.

Hasil kenerja anggota DPRD tersebut diatas menjadi data analisis ukuran untuk keberhasilan yang ditunaikan oleh kapasitas diri masing-masing sebagai nilai tingkat kemampuan mewujudkan aspirasi rakyat. Besar kecilnya jumlah alokasi anggaran belanja tidak langsung dalam APBD yang diperjuangkan oleh anggota DPRD menjadi indikator pengukur kemampuan mewujudkan aspirasi rakyat. Jika jumlah alokasi anggaran sedikit berarti kemampuannya kurang dan sebaliknya jika jumlah alokasi anggaran banyak berarti kemampuannya baik. Dalam penelitian ini terbukti hasil kinerja anggota DPRD Manado terbukti dalam jumlah alokasi anggaran belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2010 sangat kecil 0,5% dari jumlah anggaran pembangunan, dengan demikian kemampuan anggota DPRD mewujudkan aspirasi rakyat dinilai kurang.

Hasil analisa data penelitian ditemukan ada empat faktor yang menjadi faktor yang menentukan kemampuan diri anggota dewan apakah sanggup dalam memperjuangkan program-program pembangunan yang telah diajukannya kepada Dewan dan Pemerintah untuk disetujui mendapat alokasi anggaran. Faktor pertama kompetensi politik diri dan komunikasi politik; kompetensi politik diri adalah memahami ideologi politik, undang undang yang berlaku, sistem politik, dan juga sistem pemerintahan; komunikasi politik yang terbuka menerima informasi, bersifat mencari informasi dan menjelaskan informasi. Faktor kedua hak dan kewajiban adalah mengetahui batas hak anggota dan tugas serta fungsi,

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Mengalokasikan Anggaran Mewujudkan Aspirasi Rakyat (Revisi)

kewenangan dan tanggung-jawab, prosedur serta mekanisme organisasi. Faktor ketiga adalah dukungan adalah mereka mempunyai kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat. Faktor keempat ruang dan waktu adalah mengetahui saat yang tepat dan tempat yang tepat dalam mengajukan usul program. Temuan-temuan ini diperoleh melalui studi wawancara mendalam yang menggunakan uji kompetensi, kemudian peneliti mengikuti dan meninjau proses tahapan penyusunan anggaran. Terbukti bahwa 4 (empat) orang anggota dewan yang menyerap aspirasi dan berhasil mewujudkannya mempunyai keempat faktor tersebut diatas dengan nilai C (cukup); 20 (dua puluh) orang anggota dewan telah menyerap aspirasi tetapi tidak berhasil mewujudkan dan mempunyai keempat faktor dengan nilai D (kurang); 16 (enam belas) orang anggota dewan tidak menyerap aspirasi dan tidak ada hasil dengan nilai E (buruk). Nilai ini adalah ukuran kemampuan diri dari anggota dewan yang dikembangkan dilapangan berdasarkan pada konsep kinerja "kemampuan". Pengukuran ini berhubungan sebab-akibat variabel yang diuraikan oleh konsep, arti konsep kinerja adalah hasil, ukuran jumlah wujud nyata alokasi anggaran dan pembangunan. semakin banyak jumlah alokasi anggaran dan pembangunan maka semakin baik nilai keberhasilan, sebaliknya jika semakin sedikit jumlah alokasi anggaran dan pembangunan maka semakin buruk nilai keberhasilan. Variabel kemampuan itu akan berpengaruh terhadap variable hasil, variable hasil berpengaruh terhadap variable nilai, sehingga kemampuan kurang akibatnya hasil sedikit, sebab hasil sedikit akibatnya nilai buruk. Keberhasilan dalam penelitian politik dapat dijadikan sebuah variable, indikatornya adalah kepercayaan rakyat dan keyakinan masyarakat pada figur atau aktor politik diukur secara kuantitatif dengan identifikasi sensus dukungan warga. Keberhasilan buah harapan masyarakat tergantung sepenuhnya pada kinerja pemerintah terpilih saat ini yang jumlahnya sebagian besar tidak memiliki kemampuan dan tanggung-jawab. Masalah ini telah menjadi rahasia umum dan tetap dibiarkan begitu silih berganti terus bertahun-tahun kegagalan berulang akibat pemerintah tidak ada kemampuan. Penelitian ini adalah

usaha ilmiah untuk medalami isu nasional hilang kepercayaan rakyat pada partai, janji politik palsu, kinerja pemerintah buruk dan korup, hasil pertumbuhan ekonomi sangat lamban akibat rekrutmen politik salah memilih orang. Kemudian dianalisa secara kualitatif mamahami makna masalah untuk menemukan konsep dan metode untuk memecahkan masalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Janji politik pada waktu kampanye dan pada masa reses yang dijanjikan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak ditepati. Tidak ada wujud nyata pembangunan yang ada telah meningkatkan kesejahteraan rakyat hasil usulan perjuangan anggota DPRD dibangun diwilayah Kota Manado.
2. Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Manado dinilai kurang, oleh sebab hanya terdapat 0,5% dari anggaran Pembangunan 477 miliar rupiah sama saja dengan 2 miliar dalam APBD tahun anggaran 2010. Sangat sedikit bukan berarti lalai atau ada niat buruk tetapi tidak ada kemampuan diri memperjuangkan aspirasi rakyat, karena tidak mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD.
3. Variabel kemampuan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat dengan variable hasil, semakin baik nilai kemampuan semakin banyak hasil, sebaliknya semakin buruk nilai kemampuan semakin sedikit pula hasilnya. Selanjutnya variable hasil berpengaruh terhadap variable dukungan, semakin banyak hasil pembangunan semakin banyak dukungan.

Pada konsep kinerja tidak ada unsur dukungan, guna melengkapi penjelasan dan analisa dalam penelitian ini maka dibentuk analisa fenomena demokrasi diberi nama " analisa keberhasilan".

SARAN

Bukan rahasia lagi kegagalan anggota

Bukan rahasia lagi kegagalan anggota dewan dan pemerintah terpilih membangun serta meningkatkan kesejahteraan rakyat disebabkan karena tidak adanya kemampuan mereka miliki. Uji kompetensi pada anggota DPRD Kota Manado berjumlah 40 orang, hanya 4 orang yang mempunyai kemampuan dengan nilai C (cukup), 36 orang lagi kurang mempunyai kemampuan dengan nilai D (buruk). Penelitian ini membuktikan sebagian besar jumlah mereka yang tidak mampu, dan dibiarkan begitu saja gagal berulang tiap tahun terus menerus tanpa adanya usaha dan kesadaran untuk merevolusi diri agar menjadi mampu atau mundur dari jabatan. Masalah ketidak-mampuan perlu segera diambil tindakan untuk itu perlu disarankan sebagai berikut :

1. Perlu dibuat peraturan pemerintah yang mewajibkan anggota dewan yang tidak ada kemampuan mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan yang ada berhubungan dengan tugas, dan fungsi serta wewenang DPRD dan lulus dengan nilai baik, bagi yang tidak lulus diwajibkan mundur.
2. Peraturan pemerintah tersebut berlaku juga bagi pimpinan dan jajaran satuan kerja perangkat daerah agar terjadi sinkronisasi kemampuan.
3. Bagi mereka bergelar sarjana wajib uji kompetensi dan jika terbukti tidak ada

kemampuan diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran sesuai bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Griffin R. W. 2007, *Management*, Houghton Mifflin, Boston. ✓
- Katz F.E. dan Weig J.E.R, 1982, *Organisasi Dan Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Bandung. ✓
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, PT. Rosda Karya. ✓
- Milles A. dan Houberman, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. ✓
- Moleong, L. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. ✓
- Satori. Djam'an, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. ✓
- Undang Undang Otonomi Daerah 2008, Citra Wacana, Jakarta. ✓
- _____, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.